

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, Ctk. Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2005
- Anonim, *Himpunan Peraturan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Eko Jaya, Jakarta, 2004
- Anshorudin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2004
- Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2011.
- Bambang Poernomo, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992
- Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bhakti, Cetakan I, Bandung
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1992
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Emerson Yuntho, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014
- Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Ctk. Pertama, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2014.

- IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, CV. Diadit Media, Jakarta, 2009.
- _____, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara*, Ctk. Pertama, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006.
- Indonesian Corruption Watch, *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence dalam Hukum Nasional*, ICW, Jakarta, 2014.
- Kartonegoro, *Diklat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2008
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006.
- _____, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2012.
- Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Penerjemah Wisnu Basuki, Tata Nusa, Jakarta, 2001
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- M. Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi, Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Q-Communication, Jakarta, 2006
- _____, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Sekretariat Jenderal dan Kepantiteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009.
- M. Nuruf Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2011
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, CV Mandar Madju, Cetakan Pertama, Bandung, 2001
- Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.

- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Munawar Fuad Noeh, *Islam dan Gerakan Moral Antikorupsi*, Penerbit Zihrul Hakim, Jakarta, 1997
- PAF Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Prayitno Iman Santosa. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2009.
- Ridwan Al Makassary, *Dampak Masif Korupsi terhadap Eksistensi Negara-Bangsa*, Graha Mulia, Jakarta, 2009
- Rizki Febari, *Politik Pemberantasan Korupsi: Strategi ICAC Hong Kong dan KPK Indonesia*, Ctk. Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.
- Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi*, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2002
- Ronny Rahman Nitibaskara. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.
- Salahudin, *Korupsi Demokrasi dan Pembangunan Daerah*, Ctk. Pertama, Lembaga Anti Korupsi Pro Otonomi Daerah Bima Dompu Sumbawa (LAPINDA BIDOS) NTB Bekerjasama dengan Litera, Yogyakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998
- Suradi, *Pendidikan Antikorupsi*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2014

Syeh Hussein Alatas, *Korupsi Sebab Sifat dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta

Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Asy-Syamil, Bandung, 2000

Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, PT. Grasindo, Jakarta, 2008.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

B. Jurnal

Abdulahanaa, “Asas Pembuktian Terbalik terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume VII, Nomor 2, Juli 2013

Lilik Mulyadi, “Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (*The Reverse Burden of Proof Against Corruption Law in Indonesian Criminal Law System Related With The 2003 United Nations Convention Against Corruption*)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 101-132

C. Makalah

Barda Nawawi Arief. “Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”, Makalah yang disampaikan dalam seminar sehari tentang Mencari Solusi dan Model-Model Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Manipulasi di Lembaga Penegakan Hukum Indonesia, di Semarang pada 13 Agustus 1997

Andi Hamzah, “Ide yang Melatarbelakangi Pembalikan Beban Pembuktian”, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Debat Publik tentang Pembalikan Beban Pembuktian, Hari Rabu, Tanggal 11 Juli 2001 di Universitas Trisakti Jakarta, dalam: Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta, 2006

D. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

E. Surat Kabar

1. *Koran Tempo*, edisi 22 September 2004
2. *Suara Pembaruan*, edisi 2 Agustus 2001

F. Data Elektronik

Email dari Marwan Mas, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Korupsi di Universitas Bosowa Makassar, kepada Sri Devi Annisa Fitri, mahasiswa FH UII, 11 Oktober 2016, pukul 20.20 WIB, (Email ada pada Penulis).

Eka Periaman Zai, *Larangan Gratifikasi dalam Rangka Birokrasi Pemerintah yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001*, alamat URL <https://ekazai.wordpress.com/makalahartikel-hukum/hukum-pidana/makalah-gratifikasi/>, 30 Mei 2016, 01:34 WIB.

Gunawan Wibisono, *Setiap Tahun Indeks Korupsi Indonesia Meningkat*, terdapat dalam laman URL <http://news.okezone.com/read/2015/04/18/337/1136257/setiap-tahun-indeks-korupsi-indonesia-meningkat>, diakses pada 10 Desember 2016 pukul 22.10 WIB

<http://www.islamedia.web.id/2011/01/pembuktian-terbalik-dalam-perspektif.html>, diakses pada 12 Agustus 2016

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html#>, diakses pada 19 Juli 2016, pukul 17:06 WIB

ICW: *Vonis Bebas Terdakwa Kasus Korupsi Meningkat*, terdapat pada alamat URL www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160207/indonesiakorupsi, diakses pada 16 Juni 2016, pukul 16:55 WIB.

Kerugian Negara Akibat Korupsi 2015 Sebesar 1,3 Triliun, terdapat dalam laman URL <http://www.antikorupsi.org/id/content/kerugian-negara->

akibat-korupsi-2015-sebesar-31-triliun, diakses pada 11 Desember pukul 01.09 WIB

Lilik Mulyadi, *Alternatif Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Pasca Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (KAK 2003)*, alamat URL http://pn-pandeglang.go.id/attachments/125_alternatif%20pengaturan%20pembalikan%20beban%20pembuktian%20dalam%20uu%20pemberantasan%20tipikor.pdf, 31 Mei 2016, 19:39 WIB.

Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Korupsi, alamat URL <https://slissety.wordpress.com/sistem-pembuktian-terbalik/>, 29 Mei 2016, 22:10 WIB.

Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian oleh KPK dalam Kasus Korupsi, terdapat dalam laman URL <http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/329-penerapan-asas-pembalikan-beban-pembuktian-oleh-kpk-dalam-kasus-korupsi>, diakses pada 30 Agustus 2016, 20:34 WIB

Pengertian dan Ciri Korupsi Menurut Pakar, terdapat dalam laman URL <http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-dan-ciri-korupsi-menurut-pakar.html>. Diakses pada 8 Agustus 2016 pukul 11.45 WIB

Pengertian Hukum Pidana Islam dan Fiqh Jinayah, terdapat dalam laman URL <http://www.islamcendekia.com/2014/01/pengertian-hukum-pidana-islam-dan-fiqh-jinayah.html>, diakses pada 6 Agustus 2016 pukul 23.00 WIB

Prayuda Akbar Filowa, <https://materimahasiswahukumindonesia.blogspot.co.id/2015/08/delik-dolus-dan-delik-culpa.html>, diakses pada tanggal 31 Juli 2016, pukul 13:13 WIB

Riki Afrizal dan Harry Tyajaya, *Problematisasi Pengembangan Hukum Terkait Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Gratifikasi*, alamat URL <http://harrytyajaya.blogspot.co.id>, 30 Mei 2016, 01:21 WIB

Romli Atmasasmita, *Perspektif Pengadilan Korupsi*, alamat URL <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2977/perspektif-pengadilan-korupsi>, 26 Mei 2016, 23:01 WIB.